

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi dari akuntansi mulai analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan.

Pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem yang bekerja mengelola keuangan daerah yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kedua subsistem tersebut saling berhubungan, karena sumber penyusunan laporan keuangan SKPKD berasal dari laporan keuangan SKPD. Apabila pada SKPD tidak menyusun laporan keuangan dengan tepat, maka berdampak pada laporan keuangan yang akan disusun oleh SKPKD. Sistem akuntansi SKPD meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintah, untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan adanya Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), juga proses akuntansi yang baik sehingga tersusun laporan keuangan yang baik, untuk dapat digunakan oleh pemerintah, pemeriksa, DPR, dan masyarakat (yang mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan).

Untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, maka setiap SKPD dituntut untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbit pada tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah PP No 71 Tahun 2010 terbit, diharapkan akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk Pemerintah Pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah wajib untuk membuat sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang dibuat pemerintah daerah tersebut juga harus sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. Selain memiliki sistem akuntansi, pemerintah daerah juga harus menetapkan kebijakan akuntansi dan yang dibuat berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Kebijakan

akuntansi tersebut meliputi pemilihan metode akuntansi tertentu, perlakuan akuntansi atas suatu aset tertentu.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan, Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam menyajikan Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dalam penulisan laporan tugas akhir Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Menyajikan Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak diantaranya : Pertama bagi penulis dapat menambah pengetahuan teoritis dan wawasan mengenai penyajian laporan keuangan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur serta mampu membandingkan antara teori-teori yang diperoleh selama menempuh studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan praktik yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui penerapan dari teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dengan kondisi di lapangan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, sarana untuk menambah pengalaman kerja dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat.

Kedua bagi universitas yaitu sebagai sarana yang dapat meningkatkan prestasi atas hubungan kerja sama dengan pihak luar, memberi kesempatan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dalam membuktikan kualitas sumber daya anak didik kepada dunia usaha, menjadi tolak ukur pembelajaran yang sudah ada dan sarana peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang. Ketiga bagi pembaca yaitu sebagai referensi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar pembahasan dalam laporan tugas akhir ini tidak simpang siur, maka dalam pembahasan ini ditentukan pada pokok permasalahan seperti : pertama mengetahui rangkaian sistematis dari identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan kertas kerja konsolidasian, dan penyajian laporan keuangan. Kedua, mengetahui laporan keuangan entitas pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini untuk mendapatkan berbagai informasi dan data pendukung lainnya yaitu dengan melalui metode dokumentasi,yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari entitas, dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

